

Desak

Lebih lanjut, Sultan menuturkan terkait kepastian mengenai proyek pembangunan tol di DIY, kepastian yang dimaksud tidak hanya menyangkut pembebasan tanah tapi juga dalam pelaksanaan pembangunannya. Begitu pula dengan kepastian pembangunan program untuk pengembangan pariwisata kawasan Candi Borobudur, yang dinilai masih belum jelas.

"Borobudur itu masalah pembangunan programnya. Program untuk pengembangan pariwisata itu kan tidak hanya sekadar pariwisata ya tapi juga pengembangan kawasan

Joglosemar. Karena itu kan juga menyangkut beberapa BUMN. Apalagi Borobudur sama Prambanan kan juga sudah dimaintain sama BUMN Borobudur dan Prambanan. Saya nggak mau ada benturan-benturan dengan otoritas Borobudur. Untuk itu saya memastikan program ke depannya gimana, karena bagi saya belum begitu jelas," jelas Sultan.

Sementara itu ditemui seusai kegiatan, Sekda DIY Drs K Baskara Aji menyatakan, selain beberapa hal di atas Menteri BUMN juga mengimbau mengenai pengamanan ketersediaan bahan pangan di DIY, termasuk kestabilan harga untuk tiga komoditas pangan, yaitu beras, jagung, dan kedelai.

"Bapak Menteri minta saya secara teknis nanti bicara dengan sesmenya Pak Erick untuk mengatur yang kaitannya dengan pengamanan pangan di Yogya," ungkap Baskara Aji.

Menurutnya, di DIY sendiri tiga komoditas pangan tersebut rentan terhadap surplus maupun defisit pada saat-saat tertentu. Sehingga perlu dilakukan pengamanan dengan begitu, tidak ada saat terlalu banyak supply dan tidak ada saat kekurangan," ujarnya.

Tindak

berjalan baik di DIY, sehingga distribusinya lancar dan kebutuhan masyarakat bisa terpenuhi.

"Kalau untuk mengatasi persoalan minyak goreng, kewenangan lebih banyak di Pemerintah Pusat. Saya bisanya hanya bagaimana pelaksanaan di Yogya bisa baik saja, tetapi kalau penanganan itu kebijakan Jakarta. Saya tidak memahami," ungkap Sultan.

Kabid Perdagangan Dalam Negeri Disperindag DIY Yanto Aprianto menyatakan, untuk mencegah terjadinya penimbunan minyak goreng, pihaknya sudah berkoordinasi dengan aparat serta Pemerintah Pusat untuk melakukan pengawasan.

Mengacu

Sekali lagi, bukan untuk mempersulit, melainkan untuk memberikan kepastian perlindungan jaminan kesehatan bagi masyarakat," katanya di Jakarta, Senin (21/2).

Dikatakan, saat ini 86 persen penduduk Indonesia telah memperoleh perlindungan jaminan kesehatan dengan menjadi peserta Program JKN-KIS. Cakupan kepesertaan ini termasuk penduduk miskin dan tidak mampu, yang dibiayai oleh Pemerintah sebagai peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI). Para pensiunan ASN/TNI/Polri pun otomatis sudah menjadi peserta JKN-KIS. Tahun 2024, diharapkan 98 persen rakyat Indonesia bisa terlindungi JKN-KIS sesuai Target Rencana Pembangunan Menengah Jangka Panjang (RPJMN).

"Secara kontinuu, kami juga terus berupaya meningkatkan layanan kepada seluruh peserta JKN-KIS,

Kartel

Bahkan, kebijakan domestic market obligation (DMO) diberlakukan agar produk minyak sawit tidak dijual liar ke luar negeri. Demikian juga kebijakan domestic price obligation melalui Permendag nomor 6/2022 tentang Harga Eceran Tertinggi (HET). Fakta di lapangan masih terjadi kelangkaan. Patut diduga ada kartel pengendali komoditas strategis ini yang memandulkan efektivitas kebijakan hulu dan hilir yang diambil pemerintah.

Struktur industri minyak sawit di Indonesia lebih berkarakter oligopoli. Para pemegang kuasa sektor perkebunan sawit banyak yang terafiliasi dengan produsen minyak goreng. Bahkan ada relasi kepemilikan dengan perusahaan perdagangan distributor dan ritel besar. Pada kondisi harga internasional dan domestik yang tinggi, menjadikan praktik profit taking secara sistimatis dilakukan para pelaku bisnis sektor ini. Tidak mengherankan akan ditemukan berbagai praktik penimbunan.

Komisri Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sebagai institusi independen yang memiliki mandat penuh untuk memastikan struktur

Bahkan pengawasan itu tidak hanya dilakukan pada distributor tapi sampai di tingkat pengecer. Berdasarkan pengawasan tersebut, Pemda DIY belum menemukan adanya dugaan penimbunan.

"HET minyak goreng untuk curah Rp 11.500, kemasan sederhana Rp 13.500 dan premium Rp 14.000. Namun karena masyarakat panik sehingga berapa pun jumlah yang disuplai ke toko langsung habis diborong masyarakat," ungkapnya.

Menurutnya, berdasarkan keterangan sejumlah distributor yang dipantainya, jumlah pasokan yang masuk ke DIY harusnya sudah cukup. Misalnya di pasar, seorang

seperti menghadirkan kanal-kanal layanan digital (Mobile JKN, CHIKA, BPJS Kesehatan Care Center 165, PANDAWA hingga melalui media sosial resmi BPJS Kesehatan), simplifikasi dan kemudahan proses pendaftaran, perubahan data, pembayaran iuran, dan pelayanan informasi serta pengaduan," katanya.

Di samping itu, melakukan simplifikasi proses layanan di fasilitas kesehatan (penerapan sistem antrean online, pemanfaatan NIK untuk proses administrasi peserta, simplifikasi layanan hemodialisa dan thalassemia mayor), hingga meningkatkan kualitas layanan Program JKN-KIS melalui penguatan sinergi bersama fasilitas kesehatan, tenaga medis, dan stakeholders lainnya.

Bahkan, kini proses pengecekan status keaktifan kepesertaan peserta JKN-KIS atau mencetak kartu JKN-KIS Digital hanya perlu waktu kurang

Sambungan hal 1

dari 5 menit.

Ali Ghufuron menegaskan, kebersamaan menjadi kunci utama dalam program ini. Program JKN-KIS adalah program bersama, bukan hanya untuk kelompok masyarakat tertentu. Oleh karenanya, dibutuhkan partisipasi dari semua pihak, bukan hanya dari BPJS Kesehatan, Pemerintah atau peserta yang butuh manfaatnya saja, agar program ini bisa berjalan berkelanjutan.

"Sudah banyak regulasi yang menegaskan bahwa setiap penduduk Indonesia wajib menjadi peserta Program JKN-KIS, mulai dari UU SJSN Tahun 2004, UU BPJS Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013, Perpres Nomor 82 Tahun 2018 dan perubahan keduanya yaitu Perpres Nomor 64 Tahun 2020, Inpres Nomor 8 Tahun 2017, hingga Inpres Nomor 1 Tahun 2022," tuturnya.

"Operasi pasar memang perlu dilakukan dan sedang direncanakan, tetapi sayangnya stok yang dibutuhkan belum tersedia, sehingga operasi pasar belum bisa dilakukan. Padahal kebutuhan operasi pasar itu bisa 10 kali lipat, sampai saat ini belum ada stok untuk operasi pasar," terangnya.

Sambungan hal 1

Bulan depan sudah memasuki bulan Ramadan. Permintaan minyak goreng akan meningkat sebagaimana terjadi pada tiap Ramadan. Kenaikan permintaan bukan hanya untuk kebutuhan industri olahan makanan ataupun kebutuhan rumah tangga, namun juga permintaan untuk parcel lebaran yang mayoritas juga berisi minyak goreng. Pola permintaan musiman ini perlu juga diantisipasi agar konsumen tidak berujung terbebani harga mahal.

Dalam konteks jangka panjang, perlu redesign kebijakan yang mengarahkan terjadinya perbaikan struktur pasar minyak goreng yang oligopolis menjadi pasar yang lebih kompetitif. Hal ini tidaklah mudah, namun tetap perlu dilakukan mulai dari mengurai konsentrasi kepemilikan perkebunan sawit. Memperkuat industri rakyat yang bergerak pada sektor minyak sawit, serta pelaku distributor yang lebih banyak.*

Sambungan hal 1

di hal yang perlu dilakukan.

"Penulis adalah staf pengajar Prodi Ekonomi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan peneliti Inspect'd

(Penulis adalah staf pengajar Prodi Ekonomi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan peneliti Inspect'd

Hari Ini Festival Tembakau di Halaman Taru Martani

YOGYA (KR) - Para pelaku usaha yang bergerak di bidang tembakau akan bertemu dalam Festival Tembakau Indonesia yang digelar di halaman pabrik cerutu PT Taru Martani, Selasa (22/2) selama 3 hari. Selain itu juga digelar sejumlah kegiatan dari kenduri tembakau, lomba melinting rokok hingga penghargaan kepada tokoh yang peduli terhadap perkembangan tembakau.

Direktur PT Taru Martani, Drs Nur Achmad Affandi MBA, Senin (21/2) mengemukakan, pihaknya memberi dukungan terhadap acara ini. "Kegiatan ini yang pertama, dan berharap bisa diselenggarakan secara rutin tiap tahun," ujar Nur Achmad Affandi. Dikemukakan, salah satu yang menarik dari kegiatan ini, yakni pertemuan dengan para pelaku tembakau. Mereka dapat bertukar informasi bahkan berkembang pada transaksi.

Dikemukakan, pelaku usaha terkait de-

ngan tembakau itu sangat banyak, mulai dari petani tembakau, pedagang tembakau, agen dan distributor produk tembakau, dan lainnya. Umumnya mereka berada pada skala UMKM. Mereka perlu dikonsolidasikan dan disinergikan agar bisa saling mendukung dan memperoleh nilai tambah yang lebih besar dan dapat meningkatkan hasil usaha (kesejahteraan) mereka. "Yang harus dibangun adalah cara kerja yang kooperatif (kompetisi secara kooperatif)," ujarnya.

Menurut Nur Achmad, diharapkan dengan kegiatan ini semua pihak bisa bersinergi meningkatkan peran dan usahanya. Sehingga bisa terbangun komunikasi yang baik dan sinergi dalam berusaha, sehingga bisa mengoptimalkan potensi pasar yang ada untuk peningkatan usaha dan kesejahteraan semua stakeholders.

Andi

Badan Pangan Nasional yang terbit pada Juli tahun lalu.

Sementara itu, Gubernur Lemhannas Andi Widjajanto usai dilantik mengungkapkan, akan melakukan penguatan transformasi untuk menyesuaikan dengan tantangan geopolitik abad ke-21. Hal ini sejalan dengan amanat yang disampaikan Presiden Jokowi kepada Andi.

Andi menambahkan, dengan perangkat yang ada, pihaknya berusaha melakukan aktualisasi, sehingga Lemhannas sebagai lembaga kajian strategis mampu semakin relevan dengan perkembangan terkini.

Sedangkan Kepala Badan Pangan Nasional

Sambungan hal 1

Arief Prasetyo Adi menyatakan, pihaknya akan memperkuat sinergi dan kolaborasi dengan para pemangku kepentingan di sektor pangan di tanah air.

"Kita akan melibatkan beberapa pihak, seperti kementerian terkait (Kementerian BUMN, Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kemenko Perekonomian), seluruh stakeholder pangan lainnya, asosiasi-asosiasi peternak, nelayan, petani, kemudian kita akan sinergikan secara bersama-sama," papar Arief, seraya menyatakan, semua pihak untuk memperkuat tata kelola pangan nasional.

Kejagung

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Leonard Eben Ezer Simanjuntak mengatakan, keenam saksi tersebut diperiksa terkait mekanisme pengadaan pesawat udara.

"Pemeriksaan saksi dilakukan untuk memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan guna menemukan fakta hukum tentang tindak pidana korupsi yang terjadi dalam pengadaan pesawat udara PT Garuda Indonesia," kata Leonard.

Sebelumnya, Kamis (17/2) penyidik Jampidus Kejaksaan Agung memeriksa Juliandra Nurtjahjo, mantan Direktur Utama PT Citilink Indonesia sebagai saksi. Saat pemeriksaan berlangsung, Juliandra masih menjabat sebagai Direktur Utama Citilink Indonesia. Sehari setelah pemeriksaan beredar berita ter-

Sambungan hal 1

kait pencopotan Juliandra dari jabatan Direktur Utama Citilink Indonesia.

Pada Senin (14/2), penyidik memeriksa Chairal Tanjung, Komisar Garuda Indonesia dan Linggasari Suharso, selaku Direktur SDM dan Umum tahun 2017 serta Capten Trianto Moeharsono selaku VP Operation Planning and Control tahun 2009. Ketiganya juga diperiksa soal mekanisme pengadaan pesawat udara.

Kejaksaan Agung telah menaikkan status kasus dugaan tindak pidana korupsi PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, ke tahap penyidikan umum pada Rabu (19/1) lalu. Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin menyampaikan, penyidikan akan berkembang, tidak hanya tentang ATR 72-600, tetapi juga pengadaan Bombardier, Airbus, Boeing dan Rolls Royce.

Polri

Satgas Pangan Polri juga menemukan penjualan minyak goreng palsu yang terjadi di Kudus, Jawa Tengah. Modus yang dilakukan pelaku dengan mencampurkan minyak goreng dengan air.

Terkait temuan dugaan tindak pidana di sejumlah lokasi tersebut, Satgas Pangan Polri menyisihkan barang bukti minyak goreng tersebut untuk kepentingan penyelidikan dan penyidikan, sementara sisanya akan diedarkan kepada masyarakat di Sumatera Utara, NTT dan juga Sulawesi Selatan. "Sisanya bersama-sama stakeholder untuk bisa kami dorong dan dijual ke masyarakat," kata Helmy.

Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dirtipek) Bareskrim Polri Brigjen Pol Whisnu Herawan menyebutkan, ada sekitar 30.000 ton minyak goreng kemasan hasil penindakan Satgas Pangan Polri, yang akan didistribusikan kepada masyarakat di Sumatera Utara, khususnya wilayah Deli Serdang.

Whisnu mengingatkan kepada para pelaku usaha untuk tidak menimbun minyak goreng dengan menghambat proses distribusi. Satgas



Prakiraan Cuaca Selasa, 22 Februari 2022

Lokasi	Pagi	Siang	Cuaca Malam	Dini Hari	Suhu °C	Kelembaban
Bantul	☁	☁	☁	☁	23-31	70-95
Sleman	☁	☁	☁	☁	22-30	70-95
Wates	☁	☁	☁	☁	24-31	70-95
Wonosari	☁	☁	☁	☁	23-31	70-95
Yogyakarta	☁	☁	☁	☁	23-31	70-95

Unggah – Ungguh Kebijakan Publik



Ferri Wicaksono, SIP, MA
Dosen Prodi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ekonomi dan Sosial Universitas AMIKOM Yogyakarta

tepatnya penulis ingin memberi pemahaman bahwa kebijakan publik memiliki idealitas proses yang perlu melibatkan segenap aktor untuk menjamin 'penerimaan' terhadap produk kebijakan tersebut.

Bahasan kebijakan publik acapkali menjadi perbincangan hangat diantara warga negara. Belum lagi jika kebijakan tersebut dinilai kontroversi, maka perbincangan yang awalnya hangat bisa berkembang menjadi perpecahan atas dasar situasi ketidakpuasan. Apakah wajar publik yang disebut warga negara menyatakan ketidakpuasannya? Sangat wajar tentunya.

Perlu kita pahami bersama, bahwa negara sebagai sebuah organisasi lahir berdasar atas kebutuhan diantara para individu – individu yang mendiami suatu lingkup wilayah tertentu dan menyatakan suatu kesepakatan untuk membentuk organisasi sebagai fasilitator diantara

mereka, oleh John Locke disebut dengan istilah Pactum Unionis. Singkatnya negara bukan melahirkan warganya, namun negara dilahirkan oleh warganya.

Selanjutnya sejauh mana kekuasaan negara terhadap warganya? Didalam fungsi fasilitasinya, negara bersama-sama dengan warganya memproduksi aturan main atau disebut peraturan perundang-undangan didalam konteks negara hukum. Melalui peraturan perundang-undangan yang selanjutnya dapat diwujudkan sebagai produk kebijakan publik itulah menjadi batasan kekuasaan negara.

Kebijakan publik menjadi satu jenis produk politik yang harapannya menjadi kejelasan hak bagi warga negara dalam menikmati keberfungsian dari sebuah organisasi yang disebut negara. Adanya sebuah kebijakan publik memberikan jaminan bagi warga negara dalam menjaga keberlangsungan hidup, mendapat perlindungan atau terhindar

dari tindak kesewenang-wenangan pihak lain. Idealnya kebijakan publik dihasilkan melalui perdebatan diantara para penyelenggara negara.

Lantas siapa yang disebut penyelenggara negara? Terdapat 2 (dua) unsur penyelenggara negara: Pertama, pejabat negara. Disebut pejabat negara terdiri dari individu – individu yang diberikan kewenangan menduduki jabatan tertentu dalam lembaga negara sesuai peraturan perundang – undangan. Seringkali diistilahkan pemangku kepentingan. Kedua, warga negara. Dapat terdiri dari warga sipil maupun mereka yang teridentifikasi sebagai kelompok kepentingan.

Diperjelas oleh Mark H. Moore bahwa aktor kebijakan publik terdiri dari state actor (eksekutif, legislatif, yudikatif), private actor (pengusaha dan kelompok kepentingan tertentu), dan civil/public actor (masyarakat umum/warga). Idealnya ketiga aktor itulah yang perlu

difasilitasi 'berdebat' sebelum sebuah kebijakan publik disahkan. Seringkali public actor ditinggalkan didalam perdebatan tersebut, masih saja dianggap sebatas objek kebijakan publik saja.

Kapan publik boleh mendebat kebijakan? Mudahnya, manakala kebijakan tersebut dirasa merugikan ataupun tidak ada indikasi benefit bagi publik. Benefit sebuah kebijakan tidak bisa diasumsikan oleh state actor saja. Karena kebijakan publik bukan merupakan produk asumsi namun produk yang menciptakan sebuah kepastian atas benefit yang dirasakan publik menuju kondisi kesejahteraan, jika belum pasti maka produk tersebut layak untuk ditinjau ulang.

Kebijakan publik idealnya perlu diproses cepat, namun bukan berarti meninggalkan ketepatan. Ketepatan publik harus berdasar: Berdasar atas filosofis atau kesesuaian dengan falsafah hidup bangsa kita yakni Pancasila. Berdasar atas yuridis atau kesesuaian



dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku, mulai dari keterlibatan aktor, mekanisme perumusan hingga penetapan. Berdasar atas sosiologis atau kesesuaian dengan tuntutan kebutuhan mayoritas warga, ditunjukkan dengan hasil riset dan penajaman persepsi warga. Kedepan perlu kita bersama – sama menjaga kebijakan publik semakin berdasar dengan senantiasa menjaga unggah – ungguh. Keharmonisan sebuah negara sangat ditentukan seberapa mampu para penyelenggaranya menjaga unggah – ungguh ber-kebijakan publik. Kebermanfaatannya sebuah negara kembali lagi ditegaskan dengan diindikasikan dari kemampuan negara menjadi fasilitator bukan menjadi diktator atas keberlangsungan kebijakan publik. Sekian semoga bermanfaat.***